

## Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Padang

Muhammad Ikhsan<sup>1</sup>, Rahmadani Yusran<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

<sup>2\*</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 13 November 2022

Publish : 6 Januari 2023

---

#### Keywords:

Komunikasi, Kebijakan Stunting, Kota Padang

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 13 November 2022

Publish : 6 Januari 2023

---

### Abstract

*This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of Policy Communication in stunting prevention in the city of Padang based on Indonesian Presidential Regulation No. 72 of 2021 Regarding the acceleration of stunting reduction, policy communication in stunting prevention is based on 5 pillars which contain the acceleration of stunting reduction in order to achieve sustainable development. measured when children are under 5 years old, in stunting prevention, the increase in the convergence of sensitive interventions in Ministries/Institutions, Provincial and Regency or City Governments and Village Governments, The method in this study is descriptive qualitative, this research chooses the research location in regional organization organizations who are involved in stunting prevention who are within the scope of the Padang City government and at the same time become research informants. The results in this study indicate that the Padang City Government implements Policy Communication in stunting prevention, carried out in several forms, namely coordinating with relevant local government organizations, providing socialization to the community, and using the media as a means of communication, in the implementation it has not been carried out as expected due to limited budget availability, differences in mindset and different views that stunting is only an implementation in the health sector, there is no special program and the limited availability of data.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Komunikasi Kebijakan dalam cegah stunting di Kota Padang berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Mengenai percepatan penurunan Stunting, Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting berdasarkan atas 5 pilar yang berisikan percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan diukur pada saat anak berusia dibawah 5 tahun, dalam pencegahan stunting peningkatan pada konvergensi intervensi sensitive pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah provinsi dan Kabupaten atau Kota serta pemerintahan Desa, Metode pada penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif, penelitian ini memilih lokasi penelitian pada Organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pencegahan stunting yang berada dalam lingkup pemerintahan Kota Padang dan sekaligus menjadi informan Penelitian, Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang melaksanakan Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan stunting, dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu melakukan koordinasi dengan organisasi pemerintahan daerah terkait, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan pemanfaatan media sebagai sarana komunikasi, di dalam pelaksanaan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan karena keterbatasan ketersediaan anggaran, perbedaan pola pikir dan perbedaan pandangan bahwa stunting hanya menjadi pelaksanaan pada bidang kesehatan saja, belum adanya program khusus serta keterbatasan ketersediaan data yang dimiliki.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Rahmadani Yusran

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: [Yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:Yusranrdy@fis.unp.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu keadaan Kondisi pada tumbuh anak atau balitayang berusia dibawah lima tahun, akibat terjadinya stunting tidak cukupnya nutrisi kronis dan infeksi berulang khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang terjadi pada bayi dalam kandungan sampai anak berusia 23 bulan (TNP2K, 2017). Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang tidak berimbang antara berat badan, tinggi badan, dan usia, Indonesia masih berada

pada angka prevalensi stunting yang dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu 24,4 persen pada tahun 2021 dan masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20%, di Kota Padang pada tahun 2017 yaitu 20,04% terdiri dari 22 pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kota Padang Kepala Dinas DP3AP2KB mencatat Pada awal tahun 2022 Kota Padang kasus angka Stunting berada pada 18,9%.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan data angka prevalensi stunting sebesar 29,9 persen. Meskipun jumlah ini di bawah rata-rata nasional, tetapi termasuk tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO 20%. Adapun jumlah beberapa daerah yang telah menjadi lokus pencegahan stunting 9 kabupaten/kota dengan angka Stunting tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, 50 Kota, Padang Pariaman dan juga Kota Padang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting, namun belum ini belum berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan. Misalnya, di Kota Padang, pelaksanaan koordinasi dan konvergensi kebijakan belum berdampak signifikan dalam pencegahan stunting (Febrian & Yusran, 2021); (Iqbal & Yusran, 2021). Saat ini Kabupaten Solok menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 40 persen (Media & Elfemi, 2021); Demikian juga, hasil evaluasi yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat belum berhasil menurunkan prevalensi stunting (Sari, D. P., & Yusran, R., 2022); Gusmiyati, G. (2022). Contohnya Di Kota Padang, koordinasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan stunting masih bersifat sektoral. Belum bersifat lintas sektoral sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Febrian & Yusran, 2021). Hal yang sama dalam upaya aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang belum banyak diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya (Iqbal & Yusran, 2021). Berbeda kajian tersebut, penelitian ini beranggapan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting masih terbatas dan belum komprehensif. Hal ini, karena belum tercipta komunikasi kebijakan multisektoral antar OPD. Akibatnya, banyak OPD yang belum menjadikan prioritas program pencegahan stunting dalam program-program yang akan dilaksanakan. Inilah yang menyebabkan upaya untuk pencegahan stunting belum berhasil dilakukan di Kota Padang.

Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting pada hakekatnya sebagai intervensi komunikasi perubahan perilaku di kabupaten/kota. Tujuannya dilaksanakannya untuk menyampaikan suatu informasi melalui percakapan secara tatap muka antara individu atau antara individu dan kelompok orang untuk mencapai tujuan mengubah perilaku individu atau kelompok orang tertentu. (Kemenkes RI, 2021). Sesuai dengan konsep yang dikemukakan ( Rogers & Kincaid 1981 ) dalam ( La mani & Guntoro 2020 ) Komunikasi merupakan suatu proses yang dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Namun demikian, Komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang, belum berhasil dilaksanakan, Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dalam pelaksanaan Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting di Kota Padang belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pola pikir dan perbedaan pandangan bahwa pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting itu dilaksanakan oleh instansi yang berada pada Dinas kesehatan saja, tidak menjadi focus utama, di dalam pelaksanaannya OPD-OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kota Padang melakukan pelaksanaan pencegahan stunting hanya bersifat menyesuaikan misal dari Dinas Sosial Kota Padang melakukan kegiatan Bantuan Langsung tunai (BLT) dengan tujuan salah satunya yaitu perbaikan gizi melalui perbaikan ekonomi, karena awal dari terjadinya stunting kurangnya kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi gizi, dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting di kota Padang ketersediaan anggaran akibat 2 tahun pandemi Covid-19 yang membuat pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi tidak dapat dilakukan, terbatasnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian Ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif, lokasi penelitian dilaksanakan pada instansi terkait yaitu Bappeda Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas D3AP2KB Kota Padang, BKKBN Sumatera Barat, Puskesmas pembantu Tanjung aur balai Gadang Kota Padang, Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik Wawancara dan juga Studi Dokumentasi, Dalam penelitian ini, dalam teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi berdasarkan menurut Moleong (2009) adalah teknik pada pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, orang dan alat yang berbeda (Patton dalam Moelong (2009). Sementara itu teknik analisis data Menurut Sugiyono (2019) aktivitas dalam menganalisis data dapat meliputi sebagai berikut reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan/Verifikasi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penyebab utama yang mengakibatkan meningkatnya angka anak yang mengalami Stunting di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kesadaran pencegahan stunting, kebijakan yang tidak harmonis dalam mendukung pencegahan stunting, dan masalah komunikasi dengan perubahan perilaku pada tingkat individu, masyarakat dan pelayanan kesehatan. (Kemenkes RI, 2021). Selama ini, Pemerintah Kota Padang telah melakukan komunikasi kebijakan pencegahan stunting dalam bentuk.

Pertama, terlaksananya koordinasi antar lintas sektor, pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting Kota Padang dilaksanakan melalui rembuk stunting yang dilakukan secara rutin, dan Bappeda Kota Padang sebagai leading sektor, koordinasi tersebut membahas bagaimana pengarahannya, perencanaan serta bagaimana kesiapan masing-masing OPD di dalam pencegahan stunting.

Kedua, Komunikasi Kebijakan melalui Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing –masing OPD dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya (Tupoksi), Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kepada unit pelaksana teknis seperti Puskesmas dan Posyandu dan mengedukasi kader pembangunan manusia agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan stunting, serta kepada masyarakat, tidak hanya dari Dinas Kesehatan Kota Padang komunikasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi dilakukan oleh Dinas perikanan dan Pangan Kota Padang melalui pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan, kawasan rumah pangan lestari (KRPL), Dinas D3AP2KB Kota Padang melaksanakan komunikasi melalui sosialisasi dengan membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bidan, Kader KB dan Kader stunting yang memiliki tugas memfasilitasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan survey kepada sasaran keluarga yang berisiko stunting.

Ketiga, Komunikasi Kebijakan melalui Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing –masing OPD dilaksanakan sesuai dengan tugas serta fungsi pada OPD yang ada di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kepada unit pelaksana teknis seperti Puskesmas dan Posyandu dan mengedukasi kader pembangunan manusia agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan stunting, serta kepada masyarakat, tidak hanya dari Dinas Kesehatan Kota Padang komunikasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi dilakukan oleh Dinas perikanan dan Pangan Kota Padang melalui program memanfaatkan kawasan lingkungan pada sekitar pekarangan rumah masyarakat (KRPL), Dinas D3AP2KB Kota Padang melaksanakan komunikasi melalui sosialisasi dengan membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bidan, Kader KB dan Kader stunting yang memiliki tugas memfasilitasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan survey kepada sasaran keluarga yang berisiko stunting.

Keempat, memanfaatkan media sebagai sarana Komunikasi, pada pelaksanaan komunikasi kebijakan menggunakan media sebagai sarana komunikasi. agar informasi pencegahan stunting mendapatkan cakupan yang lebih luas dalam penerimaannya, media yang digunakan yaitu cetak atau digital, contoh Organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi yaitu Dinas Kesehatan kota Padang melalui sosial media Instagram @promkesdkk.padang.

Kelima, Adanya Kader Pembangunan Manusia. Komunikasi kebijakan dilaksanakan oleh unit terkecil yaitu Kader pembangunan Manusia yang merupakan penggerak manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat pada tingkat Desa atau Kelurahan dibentuk berlandaskan kepada ( Permen ) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2001, KPM dipilih melalui musyawarah bersama dengan pimpinan kelurahan, Dinas Kesehatan, KPM memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi serta pendataan serta melaksanakan koordinasi dengan tenaga kesehatan di lingkungan sekitarnya.

Namun demikian, komunikasi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah kota Padang belum berhasil melakukan perubahan perilaku. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama Keterbatasan ketersediaan data Stunting Oleh OPD lain, di dalam komunikasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang yang paling utama adalah data, apapun yang dilakukan berdasarkan dengan data agar terlaksananya komunikasi yang baik antar stakeholder, data merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan yang diharapkan, jika tidak adanya data maka komunikasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena jika tidak terdapatnya data maka tidak adanya informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, sean MacBride (Cangara,2011) dalam (Mani & Guntoro) bahwa pada dalam dilaksanakannya komunikasi tidak harus diartikan sebagai tempat bertukar berita maupun pesan, akan tetapi sebagai perencanaan individu dan juga kelompok tentang pertukaran data, fakta dan ide, jadi dalam pelaksanaan pencegahan stunting yang dilaksanakan di kota padang pemanfaatandata dengan tujuan OPD memanfaatkan dasar sesuai dengan perencanaanya yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya. Kedua kurangnya ketersediaan anggaran, dalam 2 tahun kegiatan komunikasi dalam pencegahan Stunting mengalami hambatan karena pandemi Covid 19 yang membuat seluruh anggaran dari Pusat dan daerah di alihkan untuk penanganan Covid 19 oleh karena itu belum stabilnya aggaran menjadi terhambatnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh masing masing OPD, Ketiga Pola fikir dan perbedaan pandangan serta OPD belum mejadikan stunting sebagai program khusus, pelaksanaan Komunikasi kebijakan dalam pencegahan Stunting di Kota Padang pada OPD yang terlibat masih adanya adanya pemikiran yang selektif yang menyatakan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan pada OPD yang bergerak pada bidang kesehatan saja akan tetapi OPD masih belum memahami arti penting pencegahan stunting sehingga dapat dikatakan bahwa dari pemikiran tersebut pelaksanaan komunikasi kebijakan pencegahan stunting tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pencegahan stunting ini masing-masing OPD tidak terdapatnya program karena terdapatnya tumpah tindih pelaksanaan pencegahan stunting, inilah yang menyebabkan belum tercapainya Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan Stunting Di Kota Padang.

#### **4. KESIMPULAN**

Berlandaskan pada Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan mengenai Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan dalam Pencegahan stunting di Kota Padang dapat di ambik kesimpulan bahwa pelaksanaan Komunikasi Kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi yang diberi nama rembuk stunting, dilaksanakannya Sosialisasi Kepada masyarakat yang dilakukan Oleh masing – masing OPD serta di dalam pelaksanaanya juga memanfaatkan Media sebagai sarana Komunikasi, di dalam pelaksanaanya Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting di Kota Padang Belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena Keterbatasan OPD terkait dengan ketersediaan Data stunting, Keterbatasan ketersediaan anggaran serta pola fikir dan perbedaan pandangan serta OPD tidak memasukanya Stunting sebagai program khusus dengan berbagai faktor tersebut yang membuat pelaksanaan Komunikasi

Kebijakan dalam pencegahan stunting yang dilaksanakan di Kota Padang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Febrian, F., & Yusran, R. 2021. Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 11-21.
- Gusmiyati, G. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(3), 299-304.
- Indah, S., & Yusran, R. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16511-16516.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- La mani, G. (2020). Budaya dan Kesain Komunikasi Kebijakan Publik Teori dan contoh Kasus Aplikasinya . Bandung : Rosda.
- Moleong, L. J. (2009). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Indonesia Nomor 72 Tahun 2021
- Sari, D. P., & Yusran. R. 2022. Evaluasi kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan. *Journal od Civic Education*, 5(1), 90-100.
- Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan) A. Nuryanto. Alfabeta.
- TNP2K, P. U. (2017). *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.